

LAPORAN KERJA PRAKTEK
ANALISIS WEBSITE BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI BALI



Dipersiapkan oleh:

Kadek Lia Turyani / 15 07 08142

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Kerja Praktek

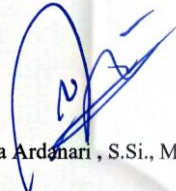


Laporan ini telah diperiksa dan disetujui

Pada tanggal :

Oleh :

Dosen Pembimbing,



Patricia Ardanari, S.Si., M.T.

Patricia Ardanari, S.Si., M.T.

Pembimbing Lapangan,



Ir. Desak Nyoman Triarsini

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Kerja Praktek di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali dengan lancar dan baik.

Kerja Praktek merupakan salah satu dari mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Teknik Industri. Penyusunan laporan Kerja Praktek ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah wajib dan merupakan salah satu syarat kelulusan akademik pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Melalui Kerja Praktek ini penulis banyak mendapatkan pengalaman berharga, bantuan dan bimbingan, baik bimbingan dari pihak perusahaan maupun bimbingan dari pihak kampus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Martinus Maslim, S.T., M.T. selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Patricia Ardanari, S.Si., M.T. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan dukungan dalam melaksanakan Kerja Praktek sehingga terlaksana dengan baik.
3. Ir. Catur Sentana selaku Kepala BKKBN Perwakilan Bali yang telah menerima untuk melakukan Kerja Praktek.
4. Ibu Ir. Desak Nyoman Triarsini selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan bimbingan dan masukan-masukan selama pelaksanaan kerja praktek.
5. Bapak I Made Rianto, SE dari sub bidang Data dan Informasi di BKKBN yang telah ikut serta membantu dan memberi masukan selama pelaksanaan kerja praktek.
6. Orang tua tercinta, yang memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material kepada penulis untuk selalu berusaha mencapai hasil yang terbaik.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat.

Penulis menyadari bahwa dalam mengerjakan laporan Kerja Praktek ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun.

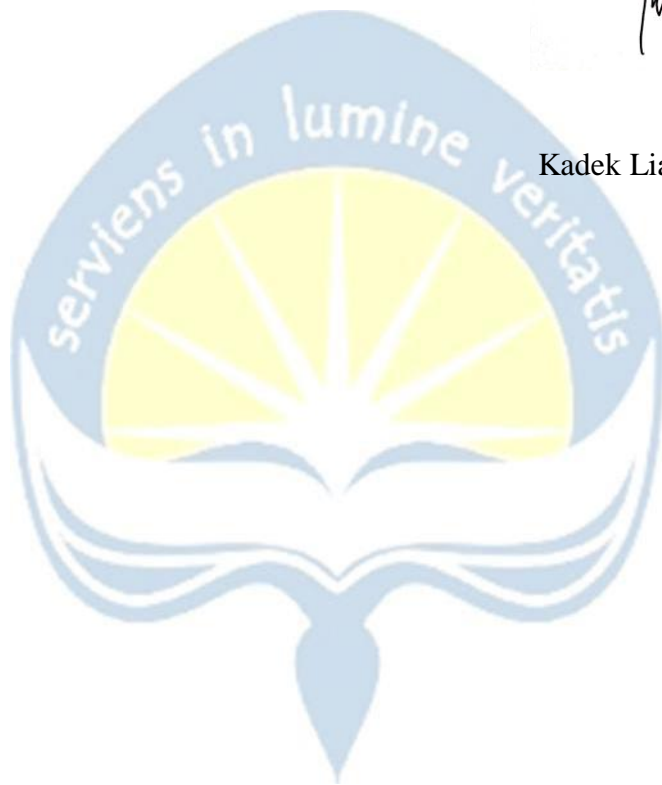
Akhir kata, semoga Laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 4 Maret 2019

Penulis,



Kadek Lia Turyani

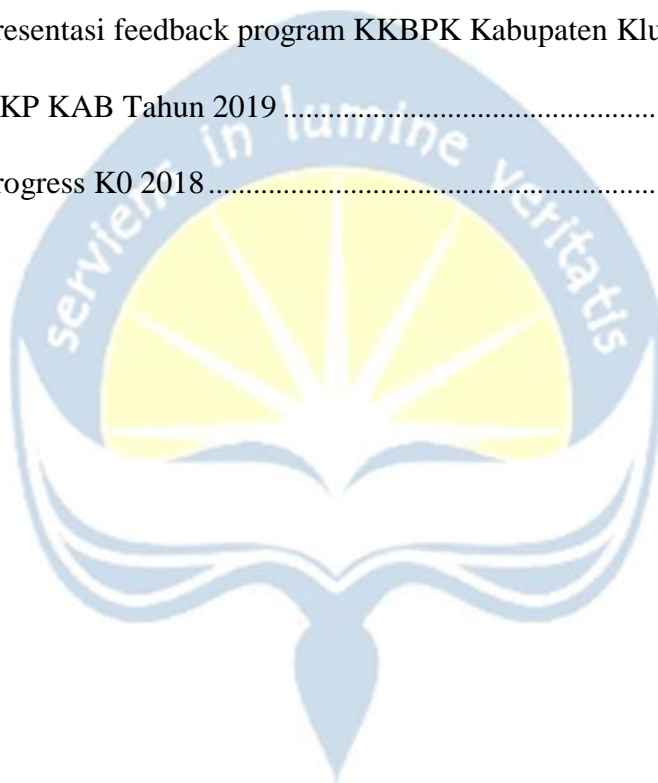


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
1. BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Sekilas Perusahaan.....	1
1.2. Sejarah Perusahaan	1
1.3. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan	8
1.4. Struktur Organisasi Perusahaan	10
1.5. Deskripsi Tugas Struktur Organisasi Perusahaan	11
1.6. Departemen TI dalam Perusahaan	12
2. BAB II : PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK.....	13
2.1. Penjelasan Logbook.....	13
2.2. Hasil Pekerjaan Secara Umum	18
2.3. Bukti Hasil Pekerjaan.....	19
3. BAB III : HASIL PEMBELAJARAN.....	22
3.1. Manfaat Kerja Praktek.....	22
3.2. Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek.....	23
4. BAB IV : KESIMPULAN	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi	10
Gambar 2.1. Analisis Website bkkbn.go.id	19
Gambar 2.2 Folder File Laporan DALAP 2018 Tabel Pembinaan Komplek UPPKS ..	19
Gambar 2.3. File Laporan Dalap Cakupan Data Wilayah dan Institusi KB di Lapangan tahun 2018.....	20
Gambar 2.4. Presentasi feedback program KKBPK Kabupaten Klungkung.....	20
Gambar 2.5. KKP KAB Tahun 2019	21
Gambar 2.3. Progress K0 2018	21



BAB I

PENDAHULUAN

1. Sekilas mengenai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugasnya, BKKBN mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan nasional
- 2) Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria
- 3) Pelaksanaan advokasi dan koordinasi
- 4) Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi
- 5) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi
- 6) Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

2. Sejarah mengenai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali

Periode Perintisan (1950-an – 1966)

Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau Indonesia Planned Parenthood Federation (IPPF). PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga- keluarga

yang sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasihat perkawinan.

Pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman. Kelahiran Orde Baru pada waktu itu menyebabkan perkembangan pesat usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh wilayah tanah air.

Dengan lahirnya Orde Baru pada bulan maret 1966 masalah kependudukan menjadi fokus perhatian pemerintah yang meninjaunya dari berbagai perspektif. Perubahan politik berupa kelahiran Orde Baru tersebut berpengaruh pada perkembangan keluarga berencana di Indonesia. Setelah simposium Kontrasepsi di Bandung pada bulan Januari 1967 dan Kongres Nasional I PKBI di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1967.

Periode Keterlibatan Pemerintah dalam Program KB Nasional

Di dalam Kongres Nasional I PKBI di Jakarta dikeluarkan pernyataan sebagai berikut:

PKBI menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah mengambil kebijaksanaan mengenai keluarga berencana yang akan dijadikan program pemerintah PKBI mengharapkan agar Keluarga Berencana sebagai Program Pemerintah segera dilaksanakan. PKBI sanggup untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program KB sampai di pelosok-pelosok supaya faedahnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 1967 Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia yang berisikan kesadaran betapa pentingnya menentukan atau merencanakan jumlah anak, dan menjarangkan kelahiran dalam keluarga sebagai hak asasi manusia.

Pada tanggal 16 Agustus 1967 di depan Sidang DPRGR, Presiden Soeharto pada pidatonya “Oleh karena itu kita harus menaruh perhatian secara serius mengenai usaha-usaha pembatasan kelahiran, dengan konsepsi keluarga berencana yang dapat dibenarkan oleh moral agama dan moral Pancasila”. Sebagai tindak lanjut dari Pidato Presiden tersebut, Menkesra membentuk

Panitia Ad Hoc yang bertugas mempelajari kemungkinan program KB dijadikan Program Nasional.

Selanjutnya pada tanggal 7 September 1968 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat, yang isinya antara lain:

- a) Membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana.
- b) Mengusahakan segala terbentuknya suatu Badan atau Lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana, serta terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut Menkesra pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang Pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana. Setelah melalui pertemuan-pertemuan Menkesra dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam usaha KB, Maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) dengan Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968. Lembaga ini statusnya adalah sebagai Lembaga Semi Pemerintah.

Periode Pelita I (1969-1974)

Periode ini mulai dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970 dan sebagai Kepala BKKBN adalah dr. Suwardjo Suryaningrat. Dua tahun kemudian, pada tahun 1972 keluar Keppres No. 33 Tahun 1972 sebagai penyempurnaan Organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada. Status badan ini berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden. Untuk melaksanakan program keluarga berencana di masyarakat dikembangkan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program dan situasi serta kondisi masyarakat. Pada Periode Pelita I dikembangkan Periode Klinik (Clinical Approach) karena pada awal program,

tantangan terhadap ide keluarga berencana (KB) masih sangat kuat, untuk itu pendekatan melalui kesehatan yang paling tepat.

Periode Pelita II (1974-1979)

Kedudukan BKKBN dalam Keppres No. 38 Tahun 1978 adalah sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang mendukungnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan di lapangan. Periode ini pembinaan dan pendekatan program yang semula berorientasi pada kesehatan ini mulai dipadukan dengan sector-sektor pembangunan lainnya, yang dikenal dengan Pendekatan Integratif (Beyond Family Planning). Dalam kaitan ini pada tahun 1973-1975 sudah mulai dirintis Pendidikan Kependudukan sebagai pilot project.

Periode Pelita III (1979-1984)

Periode ini dilakukan pendekatan Kemasyarakatan (partisipatif) yang didorong peranan dan tanggung jawab masyarakat melalui organisasi/institusi masyarakat dan pemuka masyarakat, yang bertujuan untuk membina dan mempertahankan peserta KB yang sudah ada serta meningkatkan jumlah peserta KB baru. Pada masa periode ini juga dikembangkan strategi operasional yang baru yang disebut Panca Karya dan Catur Bhava Utama yang bertujuan mempertajam segmentasi sehingga diharapkan dapat mempercepat penurunan fertilitas. Pada periode ini muncul juga strategi baru yang memadukan KIE dan pelayanan kontrasepsi yang merupakan bentuk “Mass Campaign” yang dinamakan “Safari KB Senyum Terpadu”.

Periode Pelita IV (1983-1988)

Pada masa Kabinet Pembangunan IV ini dilantik Prof. Dr. Haryono Suyono sebagai Kepala BKKBN menggantikan dr. Suwardjono Suryaningrat yang dilantik sebagai Menteri Kesehatan. Pada masa ini juga muncul pendekatan baru antara lain melalui Pendekatan koordinasi aktif, penyelenggaraan KB oleh pemerintah dan masyarakat lebih disinkronkan pelaksanaannya melalui koordinasi aktif tersebut ditingkatkan menjadi koordinasi aktif dengan peran ganda, yaitu selain sebagai dinamisor juga sebagai fasilitator. Disamping itu, dikembangkan pula strategi pembagian wilayah guna mengimbangi laju kecepatan program. Pada periode ini juga secara resmi KB Mandiri mulai dicanangkan pada tanggal 28 Januari 1987 oleh Presiden Soeharto dalam acara penerimaan peserta KB Lestari di Taman Mini Indonesia Indah. Program KB Mandiri dipopulerkan dengan kampanye Lingkaran Biru (LIBI) yang bertujuan memperkenalkan tempat-tempat pelayanan dengan logo Lingkaran Biru KB.

Periode Pelita V (1988-1993)

Pada masa Pelita V, Kepala BKKBN masih dijabat oleh Prof. Dr. Haryono Suyono. Pada periode ini gerakan KB terus berupaya meningkatkan kualitas petugas dan sumberdaya manusia dan pelayanan KB. Oleh karena itu, kemudian diluncurkan strategi baru yaitu Kampanye Lingkaran Emas (LIMAS). Jenis kontrasepsi yang ditawarkan pada LIBI masih sangat terbatas, maka untuk pelayanan KB LIMAS ini ditawarkan lebih banyak lagi jenis kontrasepsi, yaitu ada 16 jenis kontrepsi.

Pada periode ini ditetapkan UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 khususnya sub sector Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, maka kebijaksanaan dan strategi gerakan KB nasional diadakan untuk mewujudkan keluarga Kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Periode Pelita VI (1993-1998)

Pada Pelita VI dikenalkan pendekatan baru yaitu “Pendekatan Keluarga” yang bertujuan untuk menggalakan partisipasi masyarakat dalam gerakan KB nasional. Dalam Kabinet Pembangunan VI sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan 19 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono ditetapkan sebagai Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, sebagai awal dibentuknya BKKBN setingkat Kementerian.

Pada tanggal 16 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan merangkap sebagai Kepala BKKBN. Dua bulan berselang dengan terjadinya gerakan reformasi, maka Kabinet Pembangunan VI mengalami perubahan menjadi Kabinet Reformasi Pembangunan Pada tanggal 21 Mei 1998, Prof. Haryono Suyono menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesra dan Pengentasan Kemiskinan, sedangkan Kepala BKKBN dijabat oleh Prof. Dr. Ida Bagus Oka sekaligus menjadi Menteri Kependudukan.

Periode Pasca Reformasi

Dari butir-butir arahan GBHN Tahun 1999 dan perundang-undangan yang telah ada, Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Arahan GBHN ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Sejalan dengan era desentralisasi, eksistensi program dan kelembagaan keluarga berencana nasional di daerah mengalami masa-masa kritis. Sesuai dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001, yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menyatakan bahwa sebagian urusan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota selambat-lambatnya Desember 2003. Hal ini sejalan dengan esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 (telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan demikian tahun 2004 merupakan tahun pertama Keluarga Berencana Nasional dalam era desentralisasi. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi BKKBN. Undang-Undang tersebut mengamankan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dengan misi “mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera”. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 Undang-Undang tersebut di atas. Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN (pasal 54 ayat 1 dan 2). Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Renstra BKKBN tentang Pembangunan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator kinerjanya.

Pasca Reformasi Kepala BKKBN telah mengalami beberapa pergantian: Pada Periode Kabinet Persatuan Indonesia, Kepala BKKBN dirangkap oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa.

Setelah itu digantikan oleh Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir pada tahun 2001 dan meninggal dunia pada akhir 2003 akibat penyakit kanker dan yang kemudian terjadi kekosongan.

Pada tanggal 10 November 2003, Kepala Litbangkes Departemen Kesehatan dr. Sumarjati Arjoso, SKM dilantik menjadi Kepala BKKBN oleh Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi sampai beliau memasuki masa pensiun pada tahun 2006.

Setelah itu digantikan oleh Dr. Sugiri Syarief, MPA yang dilantik sebagai Kepala BKKBN pada tanggal 24 Nopember 2006. Sebagai tindak lanjut dari UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, di mana BKKBN kemudian direstrukturisasi menjadi badan kependudukan, bukan lagi badan koordinasi, maka pada tanggal 27 September 2011 Kepala BKKBN, Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA akhirnya dilantik sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

Pada tanggal 13 Juni 2013 akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Fasli Jalal sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

3. Visi, Misi dan Tujuan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali

➤ Visi

Visi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali untuk subbidang data dan informasi adalah

“Menjadikan lembaga yang handal dan terpercaya dalam mengelola data dan informasi kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga yang akurat dan valid serta bisa dipertanggungjawabkan”

➤ **Misi**

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka cara-cara yang akan ditempuh atau misi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali untuk subbidang data dan informasi seperti tersebut di bawah ini.

- 1) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan Informasi kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga
- 2) Menyediakan data keluarga by name by address berbasis teknologi informasi (IT)
- 3) Penyebarluasan data dan informasi kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

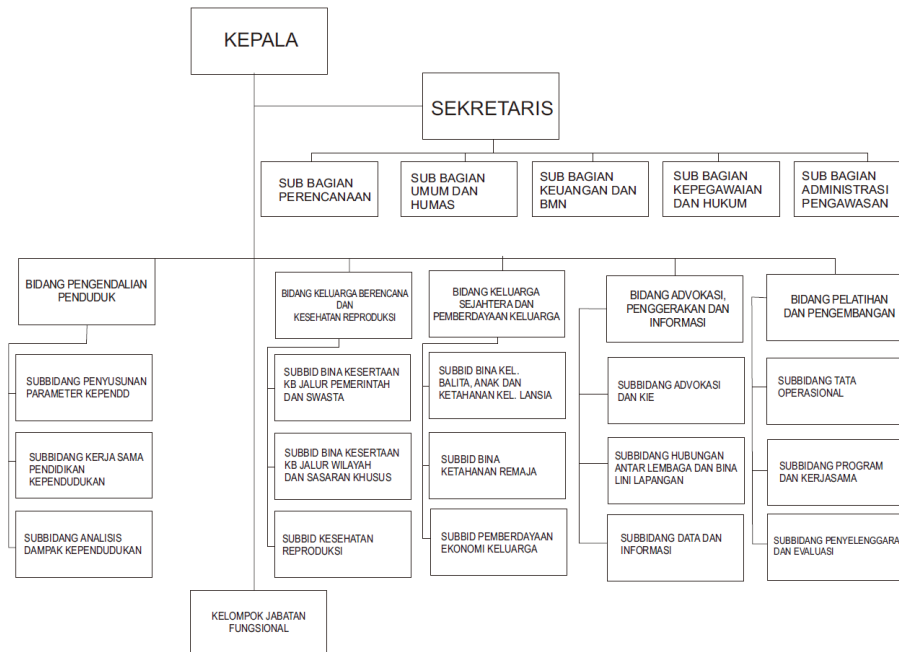
➤ **Tujuan**

Adapun tujuan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali untuk subbidang data dan informasi adalah seperti tersebut di bawah ini.

“Pengumpulan, pengelolaan, penyajian, penyebarluasaan data dan informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga.”

4. Struktur Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali

Berikan gambar bagan struktur organisasi perusahaan.



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi

5. Deskripsi Tugas Struktur Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali

a. Sekretaris

- Tugas Pokok :

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan BKKBN.

b. Bidang Pengendalian Penduduk

- Tugas Pokok :

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.

c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

- Tugas Pokok :

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

- Tugas Pokok :

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

e. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi

- Tugas Pokok :

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

f. Bidang Pelatihan dan Pengembangan

- Tugas Pokok :

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelatihan, penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

6. Subbidang Data dan Informasi pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali

Subbidang data dan informasi BKKBN bertugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB dan KR) serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga (KS/PK). Selain itu pada subbidang data dan informasi juga mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi informasi, situs resmi BKKBN (www.bkkbn.go.id) dan media informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB dan KR) serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga (KS/PK).

BAB II

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

2.1 Penjelasan Logbook

1	17 Desember 2018	Hari pertama bekerja penulis harus mengkonfirmasi diri sebagai mahasiswa kerja praktek untuk ditempatkan di bidang ADPIN. Kemudian dilakukan pengenalan dengan beberapa pegawai dan penentuan pembimbing lapangan.
2	18 Desember 2018	Hari kedua kerja praktek penulis ditempatkan di lantai 1, di bagian ADPIN sub bidang data. Pekerjaan pertama yang dilakukan adalah menerima surat masuk dan juga dokumen yang diperuntukkan ke bagian ADPIN.
3	19 Desember 2018	Hari ketiga kerja praktek penulis memiliki pekerjaan yang sama seperti hari kedua, yaitu menerima surat masuk dan dokumen yang diperuntukkan untuk ADPIN.
4	20 Desember 2018	Hari keempat kerja praktek penulis memiliki pekerjaan yang tidak jauh berbeda dari hari sebelumnya yaitu menerima surat masuk dan dokumen yang diperuntukkan untuk ADPIN.
5	21 Desember 2018	Kegiatan setiap hari Jumat diawali dengan apel olahraga pada 07.00 WITA yang kemudian dilanjutkan dengan senam rutin pagi. Setelah selesai senam, penulis kembali mendapatkan pekerjaan untuk menerima surat masuk dan dokumen.

6	31 Desember 2018	Pada hari Senin selalu diawali dengan apel pagi jam 07.30 WITA. Apel dilaksanakan kurang lebih 20 menit, lalu dimulai kegiatan kantor. Hari keenam kerja praktek penulis memiliki pekerjaan yang tidak jauh berbeda dari hari sebelumnya yaitu menerima surat masuk dan dokumen yang diperuntukkan untuk ADPIN.
7	2 Januari 2019	Penulis diberikan tugas untuk menganalisis website yang dimiliki BKKBN. Sekaligus mempelajari sedikit beberapa aplikasi milik BKKBN. Yang nantinya menurut Ibu Desak akan sering digunakan dalam pekerjaan selanjutnya.
8	3 Januari 2019	Penulis melakukan analisis terhadap <i>Front-End</i> Website BKKBN yaitu bkkbn.go.id. Hasil dari analisis ini dicatat dengan menggunakan MS. Word. Tidak ada format tertentu untuk menulis analisis, yang menjadi tujuan utama analisis adalah menemukan kelemahan atau pun kekurangan fungsi websitenya. Sehingga kedepannya dapat diperbaiki menjadi lebih baik lagi.
9	7 Januari 2019	Penulis diperkenalkan pada aplikasi SIDUGA (Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga) yang digunakan dalam pekerjaan BKKBN. Untuk bagian ADPIN sendiri, lebih sering menggunakan SR (Statistik Rutin). Disini diperlihatkan bagaimana melakukan penarikan data dan dua jenis laporan utama. Laporan ini terdiri atas laporan

10	8 Januari 2019	Penulis diberikan tugas untuk menarik data laporan DALAP bulan Oktober 2018 dengan aplikasi yang telah diperkenalkan sehari sebelumnya. Data ini akan digunakan untuk laporan akhir tahun 2018 program Kampung KB.
11	9 Januari 2019	Penulis melakukan penarikan data laporan DALAP bulan Oktober 2018. Sese kali masih menerima surat masuk dan juga dokumen ADPIN.
12	10 Januari 2019	Penulis melakukan penarikan data laporan PELKON bulan Oktober 2018 dengan aplikasi SIDUGA. Data ini akan digunakan untuk laporan akhir tahun 2018 program Kampung KB.
13	11 Januari 2019	Kegiatan setiap hari jumat diawali dengan apel olahraga yang kemudian dilanjutkan dengan senam rutin pagi.
14	14 Januari 2019	Penulis mengikuti rapat untuk bidang ADPIN. Rapat ini membahas mengenai kinerja tahun 2018 dan pencapaian yang hendak ditargetkan untuk tahun 2019. Mulai dari kinerja hingga pengelolaan dana. Penulis mendapat tugas untuk membuat rekap KKP Kabupaten 2019 dengan memasukkan data ke MS. Excel.
15	15 Januari 2019	Penulis mendapatkan tugas untuk membuat Progress K0 untuk setiap Kabupaten dengan MS. Excel.
16	16 Januari 2019	Penulis melakukan penarikan data laporan DALAP & PELKON 2018 dengan aplikasi SIDUGA. Data ini akan digunakan untuk

		laporan akhir tahun 2018 program Kampung KB dan memberikan umpan balik kepada penduduk kampung KB.
17	17 Januari 2019	Penulis melakukan penarikan data laporan DALAP & PELKON 2018 dengan aplikasi SIDUGA. Data ini akan digunakan untuk laporan akhir tahun 2018 program Kampung KB dan memberikan umpan balik kepada penduduk kampung KB.
18	18 Januari 2019	Kegiatan setiap hari jumat diawali dengan apel olahraga yang kemudian dilanjutkan dengan senam rutin pagi.
19	21 Januari 2019	Penulis melakukan penarikan data laporan DALAP & PELKON 2018 dengan aplikasi SIDUGA. Data ini akan digunakan untuk laporan akhir tahun 2018 program Kampung KB dan memberikan umpan balik kepada penduduk kampung KB.
20	22 Januari 2019	Penulis mendapat tugas untuk membuat <i>Feedback</i> Program KKBPK Kabupaten Klungkung dengan MS. Powerpoint. Di dalamnya terdapat hasil
21	23 Januari 2019	Penulis mendapat tugas untuk membuat <i>Feedback</i> Program KKBPK Kabupaten Tabanan dengan MS. Powerpoint
22	24 Januari 2019	Penulis mendapat tugas untuk membuat <i>Feedback</i> Program KKBPK Kabupaten Karangasem dengan MS. Powerpoint
23	25 Januari 2019	Kegiatan setiap hari jumat diawali dengan apel olahraga yang kemudian dilanjutkan dengan senam rutin pagi.

24	28 Januari 2019	Penulis mendapat tugas untuk membuat <i>Feedback</i> Program KKBPK Kabupaten Badung dengan MS. Powerpoint.
25	29 Januari 2019	Penulis mendapat tugas untuk membuat <i>Feedback</i> Program KKBPK Kabupaten Bangli dengan MS. Powerpoint.
26	30 Januari 2019	Penulis mendapat tugas untuk membuat <i>Feedback</i> Program KKBPK Kabupaten Jembrana dengan MS. Powerpoint.
27	31 Januari 2019	Penulis mengerjakan tugas analisis website yang diberikan oleh pembimbing lapangan, Ibu Desak. Sese kali menerima surat masuk dan dokumen untuk ADPIN.
28	1 Februari 2019	Kegiatan setiap hari jumat diawali dengan apel olahraga yang kemudian dilanjutkan dengan senam rutin pagi.
29	4 Februari 2019	Penulis mengerjakan tugas analisis website yang diberikan oleh pembimbing lapangan, Ibu Desak. Sese kali menerima surat masuk dan dokumen untuk ADPIN.
30	6 Februari 2019	Penulis mengerjakan tugas analisis website yang diberikan oleh pembimbing lapangan, Ibu Desak. Sese kali menerima surat masuk dan dokumen untuk ADPIN.
31	7 Februari 2019	Penulis mengerjakan tugas analisis website yang diberikan oleh pembimbing lapangan, Ibu Desak. Sese kali menerima surat masuk dan dokumen untuk ADPIN.
32	8 Februari 2019	Kegiatan setiap hari jumat diawali dengan apel olahraga yang kemudian dilanjutkan dengan senam rutin pagi. Selesai senam, dilanjutkan perpiahan dengan para pegawai

		BKKBN. Penulis juga mengurus surat yang diperlukan untuk penyelesaian Kerja Praktek.
--	--	--

2.2 Hasil Pekerjaan Secara Umum

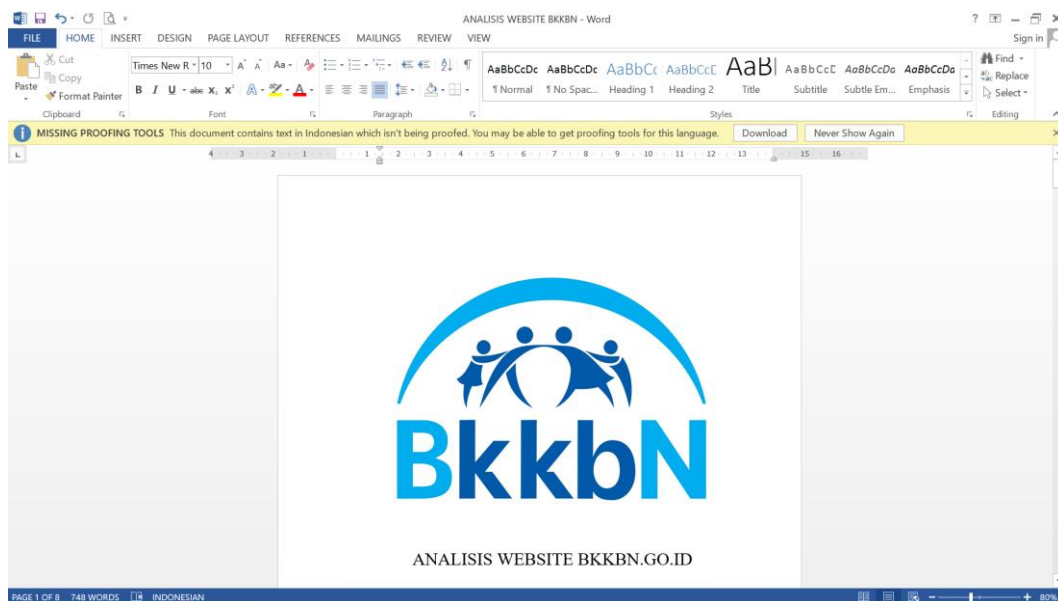
Secara umum tugas yang dilakukan selama kerja praktek di sub bidang data ADPIN BKKBN Provinsi Bali lebih banyak menangani dan mengurus dokumen. Tugas paling awal dan yang paling sering dikerjakan oleh penulis adalah menerima surat masuk dan juga dokumen. Biasanya dokumen akan dihantarkan dari perwakilan bidang lain, lalu penulis akan menandatangani buku yang menjadi bukti bahwa surat atau pun dokumen telah dihantarkan ke bidang tujuan.

Selain berkuat dengan surat, penulis juga mendapatkan tugas berupa penarikan data DALAP dan PELKON. Laporan DALAP adalah laporan pengendalian lapangan yang berisikan gambaran pelaksanaan kegiatan untuk menggarap sasaran program dari sisi permintaan. Sedangkan laporan PELKON adalah laporan pelayanan kontrasepsi yang berisikan gambaran kegiatan pelayanan kontrasepsi, dimana pelayanan dilakukan oleh klinik KB pemerintah klinik KB swasta dokter maupun bidan praktek swasta. Gambaran yang terekam pada kedua laporan ini berupa angka dari berbagai macam program untuk setiap provinsi di Indonesia. Namun karena tempat kerja praktek penulis di BKKBN Provinsi Bali, maka data yang sering diolah penulis adalah data laporan untuk provinsi Bali.

Pekerjaan lain yang diberikan oleh pembimbing lapangan adalah analisis website BKKBN. Analisis ini bertujuan untuk menemukan masalah fungsi yang ada ada website BKKBN menurut sudut pandang pengguna. Nantinya diharapkan masalah ini akan diperbaiki untuk menunjang kualitas website BKKBN. Selain itu penulis juga mengikuti rapat bidang ADPIN untuk menentukan target selama tahun 2019.

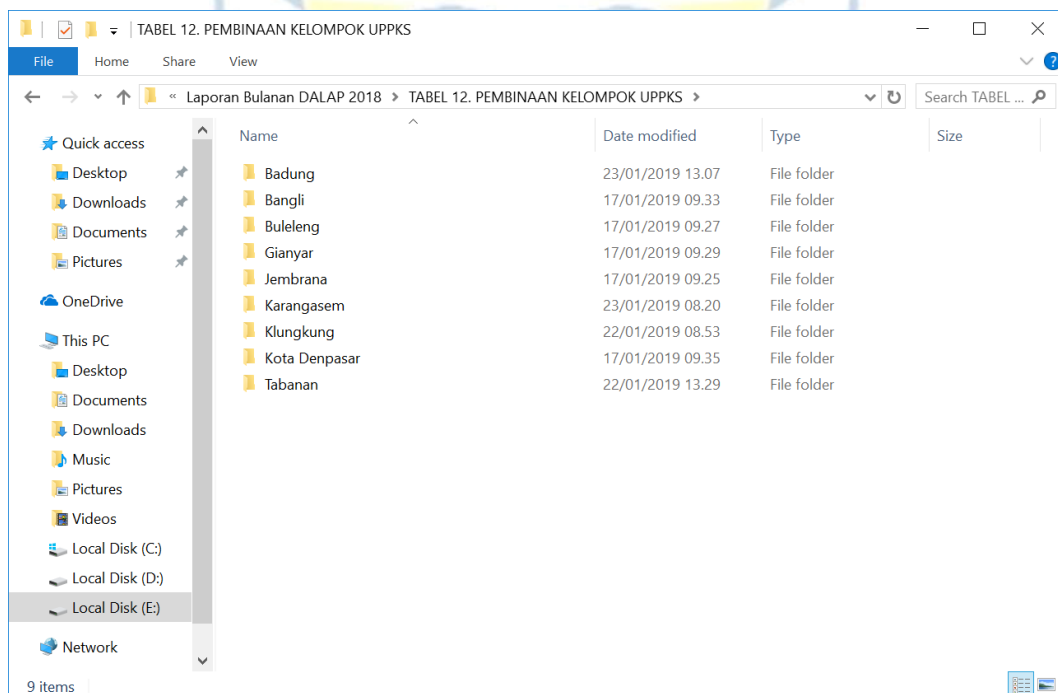
2.3 Bukti Hasil Pekerjaan

Pekerjaan 1. Analisis Website bkkbn.go.id

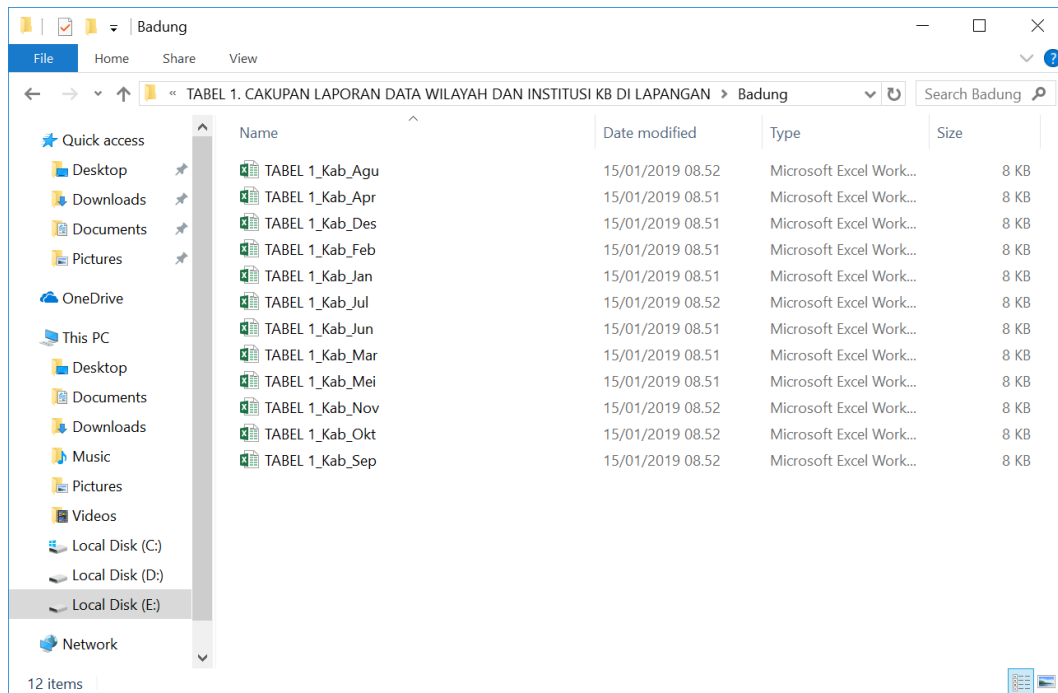


Gambar 2.1 File analisis website bkkbn.go.id

Pekerjaan 2. Data Laporan Bulanan DALAP Tahun 2018

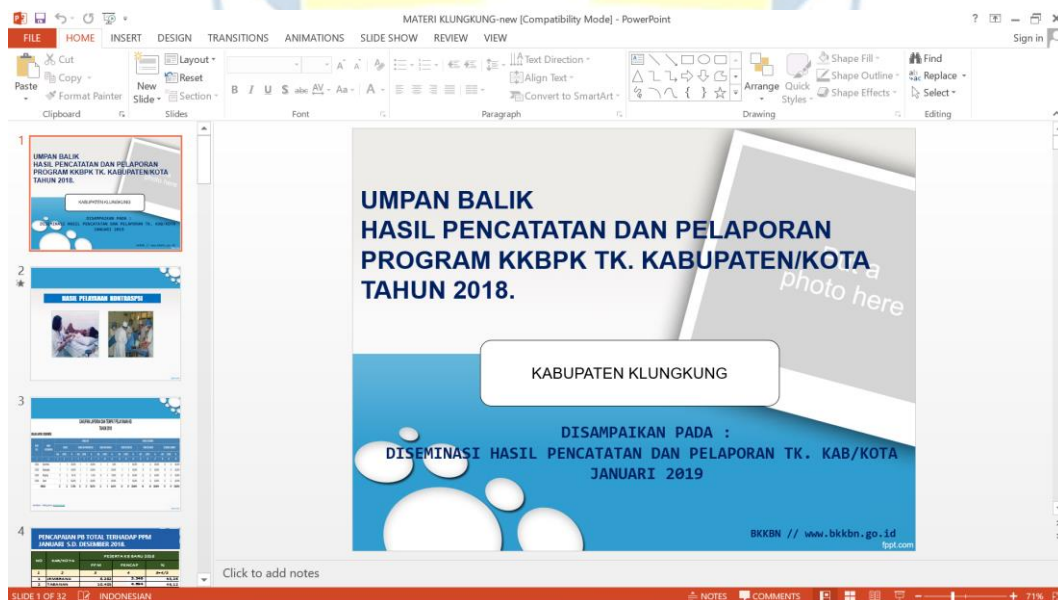


Gambar 2.2 Folder File Laporan Dalap 2018 Tabel Pembinaan Komplek UPPKS



Gambar 2.3 File Laporan Dalam Cakupan Data Wilayah dan Institusi KB di Lapangan tahun 2018

Pekerjaan 3. Umpan Balik Program KKBPK Kabupaten Klungkung



Gambar 2.4 File presentasi feedback program KKBPK Kabupaten Klungkung

Pekerjaan 4. KKP KAB Tahun 2019

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
47		g	Pembentukan PPKS di Kabupaten/Kota	g	Pembentukan PPKS di Kabupaten/Kota		9					
48	4	ADPIN										
49	a	Meningkatkan Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat		a	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat		80					
50		diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan			Advokasi dan KIE program KKBPK							
51	b	Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi		b	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan		1					
52		advokasi dan KIE pambanunan KKBPK			materi advokasi dan KIE pambanunan KKBPK							
53	c	Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media		c	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai		5 Media					
54		cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan			media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni							
55	d	budaya/tradisional		d	dan budaya/tradisional							
56		Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan			Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam		9					
57		pelayanan dasar masyarakat			penguatan pelayanan dasar masyarakat							
58	e	Wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan		e	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan		1 Provinsi dan 9					
59		kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan			pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB		Kab/Kota					
60	f	wilayah		f	diseluruh tingkatan wilayah							
61		Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja			Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam		100					
62	g	dalam implementasi program KKBPK		g	implementasi program KKBPK							
63		Pengelolaan data dan informasi program KKBPK di			Pengelolaan data dan informasi program KKBPK di		2					
64	h	Provinsi		h	Provinsi							
65		Pengelolaan data dan informasi program KKBPK di			Pengelolaan data dan informasi program KKBPK di		1					
66	i	provinsi		i	di provinsi							
		Meningkatkan Kampung KB yang telah memiliki			Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok		65					
		Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB			Kerja (POKJA) Kampung KB							

Gambar 2.5 KKP KAB 2019

Pekerjaan 5. Progress K0 2018

FILEHOMEINSERTPAGE LAYOUTFORMULASDATAVIEWVIEW

CutCopyFormat PainterClipboardFontAlignmentNumber

Wrap TextConditional FormattingTableStylesInsertDelete FormatClearSort & Find & Filter - Select

R21

<

Gambar 2.6 Progress K0 2018

BAB III

HASIL PEMBELAJARAN

3.1 Manfaat Kerja Praktek

a. Bagi Universitas

Manfaat yang diperoleh bagi Universitas khususnya program studi Teknik Informatika :

1. Menjalin hubungan baik antar Universitas dengan perusahaan.
2. Meningkatkan citra baik program studi Teknik Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Bagi Mahasiswa

Manfaat yang diperoleh bagi mahasiswa yang melakukan kerja praktek :

1. Memenuhi kurikulum yang telah ditetapkan pada program S1 Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Mendapat pengalaman baru dalam dunia kerja di lapangan sebenarnya.
3. Menjadi lebih disiplin terhadap waktu karena waktu yang telah ditentukan oleh kantor.
4. Menambah wawasan baru yang diharapkan dapat dijadikan bekal awal dalam dunia kerja.
5. Melakukan praktek langsung terhadap ilmu pengetahuan yang di dapatkan selama masa perkuliahan di dunia kerja.
6. Pengalaman yang didapatkan menjadi tolak ukur mengenai kemampuan diri sendiri mengenai teknologi informasi yang nantinya akan digunakan dalam dunia kerja.

3.2 Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek

Selama melakukan kerja praktek di BKKBN Provinsi Bali, tidak begitu banyak ilmu selama perkuliahan yang dapat diterapkan. Sebagian besar yang diperlukan adalah kemampuan untuk mengelola dan memrepresentasikan data dengan menggunakan tools Microsoft, seperti Microsoft Word, Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint. Selain itu, mata kuliah yang dapat diterapkan adalah Interaksi Manusia dan Komputer untuk melakukan analisis website BKKBN.



BAB IV

KESIMPULAN

Kerja praktek memang dijalani sebagai syarat untuk memenuhi jenjang Starata-1 Teknik Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Ternyata setelah menjalani 32 hari kerja di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali merupakan pengalaman yang memberikan banyak kesan dan pesan bagi penulis.

Selama kerja praktek, penulis dituntut untuk datang tepat waktu. Selain itu juga, penulis mendapatkan beberapa pengalaman dan pengetahuan baru mengenai contoh nyata dalam dunia bekerja. Bagaimana seharusnya tugas diselesaikan dalam tepat waktu sehingga target yang ingin dicapai pun dapat diraih. Menyelesaikan tugas yang diberikan tidak hanya dilakukan dengan seorang diri. Tapi juga bersama rekan yang lain dalam sebuah tim. Di dalam tim, terdiri dari orang yang berbeda-beda. Perbedaan yang paling menonjol dalam tim sub bidang data ADPIN adalah perbedaan usia dan karakter. Penulis mendapatkan pengalaman dalam bekerja sama dalam sebuah tim ketika mengikuti rapat hingga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan. Tidak hanya di dalam tim, namun penulis juga diharuskan untuk berbaaur dengan lingkungan sekitar kantor.

Tidak hanya mendapatkan pengalaman dan pelajaran dari lingkungan kantor, penulis pun memiliki kesempatan untuk membagikan ilmu yang dimiliki kepada beberapa pegawai. Penulis beberapa kali berkesempatan untuk berbagi ilmu mengenai pengelolaan Microsoft Tools. Penulis juga berkesempatan untuk saling berbagi ilmu melalui obrolan singkat dengan salah satu staff yang lain mengenai pengembangan website.

Setelah menyelesaikan 32 hari kerja praktek di BKKBN, diharapkan penulis mendapat dan membagikan wawasan yang dimiliki sebagai bekal awal untuk masuk ke dunia kerja. Penulis juga harap mampu menerapkan lebih banyak ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dunia kerja ataupun di kehidupan sehari-hari.